

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan akan pengolahan keuangan negara agar pengolahan keuangan negara bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur maka semakin tinggi pula pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengolahan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ini disusun dalam upaya menghilangkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Negara dan mewujudkan sistem pengolahan fiskal yang berkelanjutan. Pengelolaan keuangan yang baik akan memberikan dampak yang positif untuk berlangsungnya perekonomian negara, jika pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan maka negara akan bisa mendapat masalah yang sangat besar salah satunya adalah krisis ekonomi dan semakin bengkaknya hutang negara. Dengan diterapkannya suatu sistem mekanisme yang bisa mengatur dan mengelolah sumber keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan undang-undang, efisien dan bertanggung jawab maka negara akan bisa menjalankan kegiatan-kegiatannya dengan baik dan lancar, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 2003.

Pendanaan dan pembiayaan kegiatan pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dikelola dengan baik, maka dari itu diperlukan suatu lembaga khusus yang harus mengatasi masalah pengolahan keuangan negara mengangkat kepala KPPN selaku kuasa. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 menyebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengangkat Kepala KPPN selaku Bendahara Umum Negara untuk

melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan proses penganggaran dan pelaksanaan anggaran yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu dibangun sistem perbendaharaan dan anggaran negara menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4 menyebutkan bahwa APBN atau APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBN harus dikelola dengan baik agar apa yang menjadi tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pengelolaan belanja negara yang baik dapat dilihat pada tingkat realisasi anggaran yang sesuai dengan perencanaan pencairan dana.

Pembayaran beban atas dana APBN memiliki dua mekanisme yaitu pencairan dana melalui pencairan dana langsung dan pencairan dana uang persediaan (UP). Pencairan dana langsung dan pencairan dana uang persediaan memiliki perbedaan yaitu pencairan dana langsung digunakan untuk belanja pegawai dan belanja non pegawai, sedangkan pencairan dana uang persediaan digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari yang tidak dapat dibayarkan melalui pencairan dana langsung. Pemerintah juga mengeluarkan PMK nomor 197/PMK.05/2017 tentang rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana dan perencanaan kas untuk mengoptimalkan perencanaan penarikan atau penyerapan anggaran oleh satuan kerja kementerian atau lembaga. Dalam melakukan pencairan dana anggaran baik pencairan dana langsung maupun pencairan dana uang persediaan harus dilakukan seefisien mungkin agar pembiayaan-pembiayaan dalam rangka melancarkan kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Perbendaharaan memiliki fungsi perencanaan kas yang baik untuk pencegahan agar tidak terjadi kebocoran dan penyimpangan pencairan sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana yang menganggur untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung terdapat instansi keuangan yang memiliki fungsi dan tugas untuk mengelola keuangan yang melibatkan pencairan dana anggaran selaku bendahara umum, sebagai instansi yang diberikan kuasa dalam mengelola keuangan negara harus bekerja secara profesional.

Profesionalisme sangat perlu dimiliki oleh setiap pegawai agar dapat memberikan layanan yang memuaskan. Instansi keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai pengelola keuangan telah membuat suatu aturan dan sistem yang terkait dengan proses pencairan realisasi anggaran yang dapat membantu tercapainya apa yang telah direncanakan untuk kesejahteraan dan kebaikan negara.

Penelitian ini dilakukan di tempat PKL sebelumnya, alasan mengambil penelitian dengan judul ini karena adanya fenomena yang terjadi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung mengenai beberapa satuan kerja yang mengalami kendala dalam melakukan prosedur pencairan dana anggaran sehingga tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai prosedur kinerja pencairan dana anggaran, sehingga dapat mengetahui bagaimana prosedur pencairan dana di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung serta apa saja yang menjadi kendala bagi satuan kerja dan pada saat melakukan proses pencairan dana anggaran apakah sudah sesuai dengan prosedur. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali apakah ada teori yang sama, tetapi pada waktu yang berbeda akan memberikan hasil yang sama atau berbeda dari data sebelumnya. Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk mengangkat

judul mengenai “ Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Pencairan Realisasi Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung ”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka membatasi masalah-masalah dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut

1. Diterapkan penyesuaian tarif PPn 10% menjadi 11% di tengah jalan yang berlakunya pada tanggal 1 April 2022.
2. Adanya keterlambatan proses pencairan langsung ganti uang karena terjadi ketidaksesuaian dengan jadwal perencanaan.
3. Adanya keterlambatan dalam pencairan Ganti Uang dari SPJ para BPP yang masuk ke keuangan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah

1. Bagaimana mekanisme kinerja pencairan realisasi anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung?
2. Bagaimana proses pencairan UP (Uang Persediaan)?
3. Bagaimana proses pencairan GU (Ganti Uang)?
4. Bagaimana proses pencairan TU (Tambahan Uang)?
5. Bagaimana proses pencairan LS (Langsung)?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dalam melaksanakan Penelitian Tugas Akhir antara lain :

1.4.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan sebagai konsep penerapan fungsi alur prosedur pencairan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme proses prosedur pencairan realisasi anggaran di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung yang meliputi Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, dan Langsung

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui proses pencairan realisasi anggaran di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung
2. Untuk mengetahui proses SPP-UP (Uang Persediaan)
3. Untuk mengetahui proses SPP-GU (Ganti Uang)
4. Untuk mengetahui proses SPP-TU (Tambahan Uang)
5. Untuk mengetahui proses SPP-LS (Langsung)

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam hal pengetahuan yaitu berguna sebagai sebuah pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan mengenai tinjauan pelaksanaan prosedur pencairan realisasi anggaran. Selain itu ada pula keterkaitan judul tugas akhir ini yaitu dengan matakuliah manajemen keuangan. Manajemen keuangan pada prodi Vokasi D3 Keuangan dan Perbankan. Adapun temuan ini dapat dijadikan rujukan untuk tugas akhir selanjutnya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi dan masukan bagi pihak kantor Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung untuk pelaksanaan prosedur pencairan anggaran yang lebih efektif dan efisien.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan seperti anggaran, perencanaan keuangan, kas, kredit, analisis investasi serta usaha memperoleh dana. David Wijaya (2017:2).

Sementara Dadang Prasetyo Jatmiko (2017:1) manajemen keuangan berkaitan dengan perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian dan pengendalian sumber daya keuangan suatu perusahaan. Menurut Anwar (2019:5) manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan.

1.6.2 Tujuan Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan tujuan agar dapat digunakan sebagai standar dalam pengambilan keputusan keuangan. Berikut ini tujuan manajemen keuangan menurut beberapa para ahli : Menurut Dadang Prasetyo Jatmiko (2017:32) bahwa tujuan manajemen keuangan yaitu memaksimalkan keuntungan dan memaksimalkan kekayaan. Sedangkan menurut Musthafa (2017:5) bahwa tujuan manajemen dibagi menjadi dua yaitu :

1. Pendekatan keuntungan dan risiko yaitu manajer keuangan harus menciptakan keuntungan atau laba yang maksimal dengan tingkat risiko yang minimal

2. Pendekatan Likuiditas Profitabilitas yaitu menjaga agar selalu tersedia uang kas untuk memenuhi kewajiban finansialnya dengan segera dan berusaha agar memperoleh laba perusahaan, terutama untuk jangka panjang.

1.6.3 Fungsi Manajemen Keuangan

Nurdiansyah dan Rahman (2019:74) menyatakan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) tersebut adalah :

1. Perencanaan Keuangan dan Anggaran (*Budgeting*) Segala kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dana perusahaan yang digunakan untuk segala aktivitas dan kepentingan perusahaan. Dengan perencanaan dan pertimbangan yang matang memaksimalkan keuntungan dan meminimalisasi anggaran yang sia-sia tanpa hasil.
2. Pengendalian (*Controlling*) Berhubungan dengan tindak pengawasan dalam segala aktivitas manajemen keuangan , baik dalam penyaluran maupun pada pembukuannya yang untuk selanjutnya dilakukan evaluasi keuangan yang bisa dijadikan acuan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan selanjutnya.
3. Pemeriksaan (*Auditing*) Segala pemeriksaan internal yang dilakukan demi segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan manajemen keuangan memang telah sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan.
4. Pelaporan (*Reporting*) Dengan adanya manajemen keuangan, maka setiap tahunnya akan ada pelaporan keuangan yang berguna untuk menganalisis rasio laporan laba rugi perusahaan.

1.6.4 Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan instrumen perencanaan dan pengendalian manajemen yang berperan penting dalam organisasi sektor publik. Tidak seperti di sektor bisnis yang menjadikan anggaran sebagai dokumen rahasia perusahaan sehingga tertutup

untuk pihak luar, di sektor publik anggaran merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh publik untuk diketahui, diberitahukan, dikritisi dan diperdebatkan.

Dalam pengertian lain dapat dikatakan bahwa anggaran menurut M.Fuad dkk (2020:2), mendefinisikan “Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka waktu (*periode*) tertentu di masa datang. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun secara sistematis yang dinyatakan dalam satuan uang, barang atau jasa untuk waktu yang akan datang.

1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.
3. Perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut.

1.6.5 Tujuan dan Manfaat Anggaran

Tujuan disusunnya suatu anggaran adalah:

1. Mengkoordinasikan semua faktor produksi yang mengarah pada pencapaian.
2. Sebagai suatu alat untuk mengestimasi semua estimasi yang mendasari disusunnya suatu anggaran sebagai titik pangkal disusunnya suatu kebijaksanaan keuangan di masa yang akan datang.
3. Sebagai alat untuk melakukan penilaian prestasi, sehingga membangkitkan motivasi para pelaksananya agar dapat mengoreksi kekurangan yang terjadi.
4. Sebagai alat komunikasi semua fungsi dalam perusahaan sehingga kebijaksanaan dan metode yang dipilih dapat dimengerti dan didukung oleh semua bagian untuk tercapainya tujuan perusahaan.

Secara umum, tujuan disusunnya suatu anggaran adalah agar kebutuhan jangka pendek yang tercantum dalam anggaran dapat terpenuhi, anggaran akan menuntun agar pencapaian tujuan jangka pendek tetap konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Usia anggaran pada umumnya satu tahun bertujuan agar anggaran harus memungkinkan untuk dilakukan revisi dari waktu ke waktu karena perubahan kondisi ekonomi peraturan pemerintah serta faktor-faktor eksternal lainnya.

Manfaat anggaran pada suatu perusahaan merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan, fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan.

a. Fungsi Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen dan fungsi ini merupakan dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktifitas-aktifitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.

b. Fungsi Pengawasan

Anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam perusahaan. Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Dengan demikian pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila perlu. Aspek pengawasan yaitu dengan membandingkan antara prestasi dengan yang dianggarkan, apakah dapat ditemukan efisiensi atau apakah para manajer pelaksana telah bekerja dengan baik dalam mengelola perusahaan. Tujuan pengawasan itu bukanlah mencari kesalahan akan tetapi mencegah dan memperbaiki kesalahan.

Sering terjadi fungsi pengawasan itu disalah artikan yaitu mencari kesalahan orang lain atau sebagai alat menjatuhkan hukuman atas suatu kesalahan yang dibuat pada hal tujuan pengawasan itu untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan rencana perusahaan.

c. Fungsi Koordinasi

Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan adanya koordinasi diperlukan perencanaan yang baik, yang dapat menunjukkan keselarasan rencana antara satu bagian dengan bagian lainnya. Anggaran yang berfungsi sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam perusahaan, sehingga rencana kegiatan yang satu akan selaras dengan lainnya. Untuk itu anggaran dapat dipakai sebagai alat koordinasi untuk seluruh bagian yang ada dalam perusahaan, karena semua kegiatan yang saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya sudah diatur dengan baik.

1.6.6 Jenis-Jenis Anggaran

Anggaran yang harus disusun suatu perusahaan terdiri dari berbagai jenis anggaran. Semua aktivitas yang direncanakan suatu perusahaan di dalam periode mendatang harus di susun didalam suatu anggaran lengkap. Karena tanpa memiliki anggaran lengkap, maka aktivitas yang akan dilaksanakan tetapi tidak memiliki anggaran tersebut tetap diupayakan untuk dilaksanakan, maka aktivitas tersebut tidak dapat dinilai hasilnya. Menurut Sasongko dan Parulian (2019:4) perusahaan menyusun anggaran induk (*master buidget*) yang dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional terdiri atas anggaran penjualan sampai anggaran (*proforma*) laba rugi. Adapun anggaran keuangan terdiri atas anggaran neraca dan anggaran (*proforma*) neraca. Perusahaan

umumnya menyusun anggaran untuk keseluruhan kegiatan operasional yang dijalankan, seperti kegiatan penjualan, produksi, pemasaran, dan administrasi. Anggaran induk adalah gabungan dari seluruh anggaran yang disusun oleh perusahaan setiap tahunnya. Anggaran induk terdiri atas:

1. Anggaran Penjualan Anggaran penjualan menyajikan jumlah unit barang atau jasa sekaligus harganya yang diharapkan dapat dijual oleh perusahaan di masa depan. Pembahasan tentang anggaran penjualan secara lebih lengkap dapat dilihat pada
2. Anggaran Produksi Anggaran produksi memperlihatkan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Barang jadi yang akan diproduksi untuk setiap periode anggaran harus memperhatikan tingkat penjualan dalam unit, serta jumlah persediaan akhir dan awal barang jadi.
3. Anggaran Pemakaian dan Pembelian Bahan Baku Anggaran pemakaian dan pembelian bahan baku menyajikan dua informasi berikut.
 - a. Jumlah kebutuhan pemakaian bahan baku. Jumlah bahan baku yang diperlukan dalam satu periode anggaran ditentukan oleh jumlah barang jadi yang akan diproduksi dan standar kebutuhan bahan baku untuk setiap 1 unit barang jadi.
 - b. Nilai pembelian bahan baku dalam rupiah. Jumlah bahan baku yang akan dibeli dalam satu periode anggaran diperoleh dengan menambahkan bahan baku yang diperlukan untuk produksi dengan persediaan akhir bahan baku dan dikurangi dengan persediaan awal bahan baku yang ada di perusahaan. Kemudian, nilai pembelian bahan baku dalam rupiah diperoleh dengan mengalikan jumlah bahan baku yang akan dibeli dengan perkiraan harga beli bahan baku per unitnya.
4. Anggaran Biaya Tenaga Kerja Langsung Anggaran biaya tenaga kerja langsung memperlihatkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk memproduksi barang jadi yang ditetapkan dalam anggaran produksi. Selain itu, anggaran biaya tenaga kerja langsung juga memperlihatkan perkiraan tingkat upah yang akan diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja langsungnya.

5. Anggaran Biaya Overhead Produksi Anggaran biaya overhead produksi memperlihatkan perkiraan biaya overhead produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mencapai target produksi seperti yang ditetapkan dalam anggaran produksi.
6. Anggaran Biaya Produksi Anggaran biaya produksi memperlihatkan seluruh biaya produksi yang akan dikeluarkan pada suatu tahun anggaran. Anggaran produksi sebenarnya hanya mengumpulkan informasi-informasi yang terdapat pada anggaran pemakaian bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran overhead.
7. Anggaran Beban Operasi Anggaran beban operasi memperlihatkan perkiraan beban operasi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Secara umum, anggaran beban operasi dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu beban penjualan (selling expenses) dan beban administrasi (administration expenses).
8. Anggaran Laba Rugi Anggaran laba rugi disusun untuk memberikan informasi kepada manajemen tentang jumlah laba atau rugi bersih yang akan diperoleh perusahaan dalam suatu periode anggaran.
9. Anggaran Kas Anggaran kas disusun oleh perusahaan agar pihak manajemen memperoleh informasi tentang likuiditas perusahaan pada periode mendatang karena anggaran kas menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah penerimaan dan pengeluaran kas pada periode suatu periode anggaran. Anggaran Neraca Anggaran neraca menyajikan informasi kepada manajemen tentang hasil akhir dari seluruh anggaran yang telah disusun sebelumnya (anggaran penjualan sampai anggaran kas). Anggaran neraca juga memperlihatkan kepada manajemen tentang pengaruh kebijakan yang diambil oleh manajemen terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan dalam suatu periode anggaran.

1.7 Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sugiono (2017.2) mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan tujuan dapat menjelaskan bagaimana mekanisme kinerja pencairan dana anggaran yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung . Dalam kegiatan penelitian ini peneliti hanya memotret apa yang terjadi dalam bentuk laporan wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara lugas dan apa adanya.

1.7.1 Jenis Penelitian Dan Metode Yang Digunakan

Menurut Sugiono (2017.2) metode penelitian yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang di teliti. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya dan menekankan makna pada hasilnya.

1.7.2 Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.

2. Wawancara (*Interview*)

Interview adalah pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait dalam kegiatan PKL dan penelitian tugas akhir.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiono (2017:224-225) menyatakan bahwa, dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan natural setting (kondisi alamiah), sumber data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder, dan teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dokumentasi (*documentation*).

1. Wawancara (*Interview*) Wawancara adalah pengumpulan data dengan tanya jawab langsung yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pertanyaan yang sebagian besar terbuka, dengan sebuah panduan wawancara yang memuat pertanyaan yang terinspirasi dari penelitian terdahulu, dengan adanya pertanyaan tersebut akan memungkinkan informan untuk mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi dalam mekanisme kinerja pencairan dana anggaran.
2. Pengamatan (*Observasi*) adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Observasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah observasi penelitian pasif yaitu peneliti datang ke tempat yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. *Observasi* partisipasi aktif yaitu peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan narasumber, tetapi belum sepenuhnya lengkap.
3. Dokumentasi (*documentation*) adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti pada penelitian ini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai pelaksanaan prosedur pencairan realisasi anggaran.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan model Milles dan Huberman (1984) yang dikutip oleh Sugiono (2017:246) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data terdiri 3 aktifitas yaitu : reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) , dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

1. Reduksi data, Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data di lapangan.
2. Penyajian data, Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan penyajian data dengan teks yang bersifat naratif, tabel dan gambar. Penyajian data tidak terlepas dari tujuan penelitian untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat proses pencairan dana anggaran.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada tahap ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh selama proses pengumpulan data.

1.8 Tempat dan Waktu Penelitian

1.8.1 Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung atau disingkat Kesbangpol Kota Bandung. Alamat perusahaan Jl. Wastukencana No.2 Bandung.

1.8.2 Waktu Penelitian

Jadwal Waktu Penelitian

Tabel 1.1 Jadwal Waktu Penelitian

| No | Uraian Kegiatan | Waktu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ket |
|----|--------------------|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----|
| | | Februari | | | | Maret | | | | April | | | | Mei | | | | Juni | | | | |
| | | Minggu Ke | | | | Minggu Ke | | | | Minggu Ke | | | | Minggu Ke | | | | Minggu Ke | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Pengajuan Topik TA | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penyusunan TA | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pengolahan Data TA | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 4 | Penulisan TA | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 5 | Revisi TA | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | |
| 6 | Pengumpulan TA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | |
| 7 | Sidang TA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Keterangan :

■ Mengerjakan

□ Tidak Mengerjakan